

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara agraris dan maritim terbesar di dunia, dan karena memiliki 95,6 juta hektar lahan hutan, Indonesia telah mendapatkan julukan "paru-paru dunia" (Irwansyah, 2017). Banyak daerah di Indonesia yang terkenal dengan sumber daya alamnya, yang digunakan dalam pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Salah satu daerah yang memiliki keragaman sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, seperti tanah, hutan, dan lain-lain, adalah Jawa Barat.

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” menurut Pasal 33 UUD 1945. Hal ini berkaitan dengan bagaimana masyarakat di Indonesia memanfaatkan sumber daya alam, baik untuk kepentingan sosial budaya maupun ekonomi atau hanya untuk pelestarian lingkungan dan ekosistem.

Ekologi merupakan ilmu yang mempelajari terkait dengan makhluk hidup tentang cara interaksi makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya. Dalam mempertahankan hidupnya makhluk hidup harus saling menunjang dan menopang untuk bisa saling kuat menguatkan. Namun permasalahan ekologi yang saat ini adalah sumber penunjang bagi makhluk hidup karena memang setiap makhluk hidup memiliki sumber penunjangnya masing-masing. Ekologi bersifat interdisipliner karena mengerti dan memahami hubungan antara organisme dengan lingkungannya haruslah ditarik beberapa pengertian dari banyak bidang berkaitan.

Kegiatan Perhutanan Sosial (*Society forestry*) didefinisikan sebagai bentuk kehutanan industrial (konvensional) yang dimodifikasi untuk memungkinkan keuntungan kepada masyarakat lokal. Di Indonesia sendiri luas hutan yang dapat dimanfaatkan sebagai perhutanan sosial diperkirakan 5.087.754

Ha sampai 1 Oktober 2022 dan apabila dikalkulasikan secara persentase hanya kurang lebih 5% dari seluruh hutan yang ada di Indonesia. Sedangkan di Jawa Barat sendiri jumlah dari perhutanan sosial sekitar 2.943 Ha (Lingkungan, 2022).

Di Indonesia, pertumbuhan model perhutanan sosial terkait erat dengan tantangan dan isu signifikan yang berdampak pada tingkat keberhasilannya. Masyarakat juga memiliki pendapat yang kuat tentang program hutan kemasyarakatan (HKM), yang pada awalnya dirancang untuk mengurangi konflik kepentingan pengelola, persyaratan izin dan pengelolaan, dan kewajiban pembayaran. Tak perlu dikatakan bahwa ini terkait erat dengan kebijakan politik yang digunakan sebagai nama untuk pengelolaan perhutanan sosial.

Dalam kajian ekologi hubungan antara manusia dengan alam dikenal dengan teori antroposentris yang memiliki arti bahwa semua yang ada di alam adalah untuk manusia (Mufid, 2010). Hubungan manusia dengan alam memiliki keterkaitan karena, dari alam manusia mendapatkan penghidupan dan jika tanpa dukungan dari alam kehidupan manusia dan makhluk lainnya dapat terancam. Masih rendahnya kesadaran manusia untuk menjaga alam dan lingkungan dapat mengakibatkan terancamnya kehidupan manusia itu sendiri bahkan makhluk lainnya. Dampak dari permasalahan ekologi adalah banyaknya kerusakan alam baik di daratan, lautan maupun udara.

Menurut Food and Agriculture (FAO) laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai 1.315.000 Ha dan luas area perhutanan berkurang satu persen (1%) setiap tahunnya (Triani, 2022). Fungsi hutan adalah untuk mengontrol naikturunnya debit air pada musim hujan agar tidak meluap dan jika pada saat kemarau tidak kering. Lalu hutan memiliki fungsi sebagai hidro-orologis untuk kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Kerusakan pada lingkungan hutan disebabkan oleh ulah manusia yang menebang pohon pada hulu sungai dan menjadikan hutan konservasi dan dalam bentuk penggunaan lainnya.

Gunung Manglayang merupakan salah satu kawasan perhutanan sosial yang berada di Bandung dan Sumedang, Jawa Barat. Dengan ketinggian kurang lebih 1.818 mdpl. Letak geografis dari Gunung Manglayang sendiri berada di paling timur dari deretan Gunung yang ada di Bandung yakni Gunung Buranrang-Tangkubang Parahu, Bukit Tunggul, Gunung Manglayang. Selain dijadikan kawasan objek wisata, dan jalur pendakian gunung yang tidak terlalu tinggi ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lahan untuk pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya.

Rencana perluasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Ir. H.Djuanda. masih menjadi polemik sampai saat ini. Rencana perluasan tersebut telah diajukan kepada Dinas Kehutanan Jawa Barat pada Maret 2010. Rencana perluasan tersebut meliputi tiga daerah yaitu, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang dengan luas mencapai 2.750 Ha. Hal tersebut menjadi permasalahan dikalangan masyarakat sekitar.

Penolakan dari masyarakat terkait rencana perluasan tahura karena khawatir adanya perubahan fungsi hutan dari hutan lindung menjadi hutan konservasi, yang dapat membunuh mata pencarian masyarakat sekitar sebagai petani kopi dan peternak sapi perah. Selain dari membunuh mata pencarian petani dan peternak perluasan tahura juga akan mengganggu ekosistem. Selain dari masyarakat sekitar penolakan perluasan tahura diungkap oleh Perhutani unit III yang mengatas namakan warga dan LMDH. Kurangnya komunikasi oleh dinas terkait dengan masyarakat sekitar mengakibatkan penundaan perluasan tahura.

Permasalahan lain yang ada di sekitar wilayah Gunung Manglayang adalah masalah pengelolaan air karena, banyak dari pengelolaan air bersih di kota Bandung dikelola secara pribadi untuk kepentingan ekonomi. Pemerintah sudah berupaya dalam membangun fasilitas air bersih untuk menunjang kepentingan masyarakat tetapi pada praktiknya tidak berjalan dengan baik.

Dalam permasalahan pengelolaan air bersih tidak hanya melibatkan satu pihak saja karena, dalam pengambilan kebijakan dan berjalannya kebijakan tersebut merupakan tanggung jawab bersama berbagai pihak sebagai stakeholder yang terlibat didalamnya misal, pemerintah pusat, daerah dan masyarakat.

Penggunaan air bersih di wilayah Bandung berkembang cukup pesat, seiring dengan cepatnya pertumbuhan industri dan pertumbuhan penduduk. Hal ini mengakibatkan berkurangnya sumber air bersih. Bahkan beberapa wilayah di Bandung mengalami kekeringan saat musim kemarau. Hal tersebut menjadi keuntungan bagi beberapa pihak yang memiliki persediaan air bersih yang cukup untuk dijual pada masyarakat yang membutuhkan air bersih.

Sumber air bersih di Bandung terletak di sekitar wilayah Gunung Manglayang yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Bandung, sedangkan pengguna air dari Gunung Manglayang sebagian besar merupakan penduduk Kota Bandung meliputi wilayah Cicaheum hingga Cileunyi. Kondisi ini terus terjadi karena daerah resapan di sekitar Gunung Manglayang sudah tidak berjalan dengan baik karena alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian di sekitar wilayah Gunung Manglayang. Hal tersebut mengakibatkan sebagian besar daerah sekitar Jalan A.H. Nasution tidak memiliki sumber air bersih.

Untuk menciptakan sistem yang tidak merugikan baik pihak maupun lingkungan, pemerintah yang berfungsi sebagai sistem harus mampu menjaga keseimbangan.

Setiap keputusan yang diambil melalui proses kebijakan memiliki dinamika dan ciri khas tersendiri. Hal ini terjadi sebagai akibat dari beragamnya kepentingan dan preferensi kebijakan masing-masing peserta. Pemerintah melakukan berbagai proses kajian mendalam sebagai bagian dari proses pembuatan kebijakan. Hal ini dilakukan agar kebijakan tersebut kompatibel dengan kebijakan lain dan untuk memberikan hubungan ini sebagai metode untuk menjaga keseimbangan ketika menerapkan tata kelola. Pemeriksaan

mendalam ini dilakukan dengan menggunakan prinsip dan gagasan ekologis, dan hasilnya akan digunakan untuk menginformasikan kebijakan pemerintah. Diharapkan semua pihak memahami konsep ekosistem dan berkolaborasi secara holistik untuk mencapai keseimbangan dalam sistem politik.

Inti dari konsep kajian ekologi adalah ekosistem. Konsep inti ekologi dapat diterapkan didalam kebijakan pemerintah sebagai cara agar menekan dampak dari kebijakan pemerintah yang merugikan sistem dan masyarakat awam.

Dengan permasalahan yang sudah peneliti jelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengajukan, judul proposal penelitian yang berjudul “POLITIK EKOLOGI DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI WILAYAH GUNUNG MANGLAYANG”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah dalam pengelolaan lingkungan di wilayah Gunung Manglayang sudah sesuai dengan konsep politik ekologi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengelolaan lingkungan di wilayah Gunung Manglayang apakah sudah sesuai dengan konsep politik ekologi.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Akademis memberi sumbangsi pemikiran untuk pengembangan ilmu politik dengan ilmu lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dan juga peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi bahan

perbandingan pada masa mendatang.

2. Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada perhutani dalam pengelolaan dan pengambilan kebijakan di wilayah Gn. Manglayang supaya dapat sesuai dengan konsep politik ekologi.

E. Kerangka Berpikir

Permasalahan lingkungan dalam bingkai politik di perlukan konsep dan teori yang dapat menjelaskan suatu fenomena. Konsep politik lingkungan telah berkembang dalam ranah ilmu sosial dan memiliki istilah yang beragam diantaranya *Political Ecology*, *Green Politik and Environmental Politik*. Tetapi ketiga istilah tersebut sama-sama digunakan dalam kajian keilmuan sosial dan politik. Kajian lingkungan hidup dalam politik lingkungan mencakup pembahasan tentang; kerusakan hutan, eksploitasi tambang, polusi udara, limbah pabrik, pencemaran sungai, sanitasi dan sebagainya.

Michel Watts berpendapat bahwa, politik lingkungan merupakan cara memahami hubungan kompleks antara alam dan manusia dengan analisis dari bentuk akses dan kontrol sumber daya dan implikasinya terdapat untuk kesehatan lingkungan dan kehidupan berkelanjutan.

Political ecology menurut Lamont C. Hempel merupakan kajian tentang ketergantungan antara unit politik dan keterkaitan antara unit politik dengan lingkungan, yang berhubungan dengan konsekuensi politik dari perubahan lingkungan yang memiliki tujuan untuk menggali dan menjelaskan tentang tingkat komunitas dan aksi politik regional dalam lingkup global, reaksi atau degradasi dan kelangkaan pada lokal dan regional.

Kajian mengenai interaksi manusia dan lingkungan memiliki sejarah panjang dari berbagai disiplin ilmu. Politik lingkungan merupakan pendekatan interdisiplin untuk meneliti hubungan manusia dan lingkungan dengan kacamata kritis. Pada umumnya, fokus pada ketidak setaraan kekuasaan yang berkaitan dengan perubahan lingkungan, dan distribusi dan pelaksanaan kekuasaan politik

dan ekonomi, ditandai dengan permasalahan konflik atau alternatif masa depan dan perselisihan antara nilai alternatif dan imanjinasi. Dari hal ini berarti bahwa lingkungan merupakan satu yang harus dihadapi politik dan ekonomi (Andreucci, 2016).

Menurut Herman Hidayat, pendekatan dalam politik lingkungan yaitu kajian gerakan aktor (pelaku), dengan cara mengidentifikasi gerakan yang dilakukan oleh aktor sebagai pelaku dalam pengelolaan lingkungan untuk menentukan sudah sejauh mana aktor atau pelaku tersebut dalam kontribusi terhadap pengelolaan lingkungan. Menurutnya aktor politik lingkungan terbagi menjadi dua (Hidayat, 2011), yakni:

1. Peran Aktor Langsung

Karena negara adalah pembuat kebijakan dan memainkan peran penting dalam pembuatan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, pengelolaan, dan evaluasi, maka negara adalah aktor langsung dalam pembangunan yang disertai dengan kelestarian lingkungan serta menjadi aktor adalah memiliki pengaruh terhadap pembuat kebijakan dan berperan penting dalam pembuatan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, pengelolaan, dan evaluasi, negara adalah aktor langsung dalam pembangunan yang disertai dengan kelestarian lingkungan serta menjadi aktor yang memiliki pengaruh dan tanggung jawab atas kerusakan lingkungan .

2. Peran Aktor Tidak Langsung

Akademisi atau peneliti, LSM (lokal, nasional, dan internasional), dan organisasi keuangan internasional (bank global, dana moneter internasional, bank pembangunan Asia, dll.) adalah contoh aktor tidak langsung.

Lembaga keuangan, seperti Bank Dunia memainkan peran tidak langsung dalam mengatasi degradasi lingkungan karena mereka memberikan kontribusi keuangan dan menawarkan dukungan teknis untuk penciptaan

berbagai inisiatif . Bank Dunia, memainkan peran tidak langsung dalam mengatasi degradasi lingkungan karena mereka berkontribusi secara finansial dan menawarkan dukungan teknis untuk penciptaan berbagai inisiatif .

Peran penting akademisi dan LSM (organisasi non-pemerintah), yang bertindak sebagai pengamat dan menawarkan umpan balik tentang kebijakan pemerintah dengan meningkatkan kesadaran publik tentang masalah lingkungan seperti kerusakan lingkungan, perusakan hutan, perubahan iklim, erosi, polusi, banjir, dan kepunahan spesies biologis (flora dan fauna).

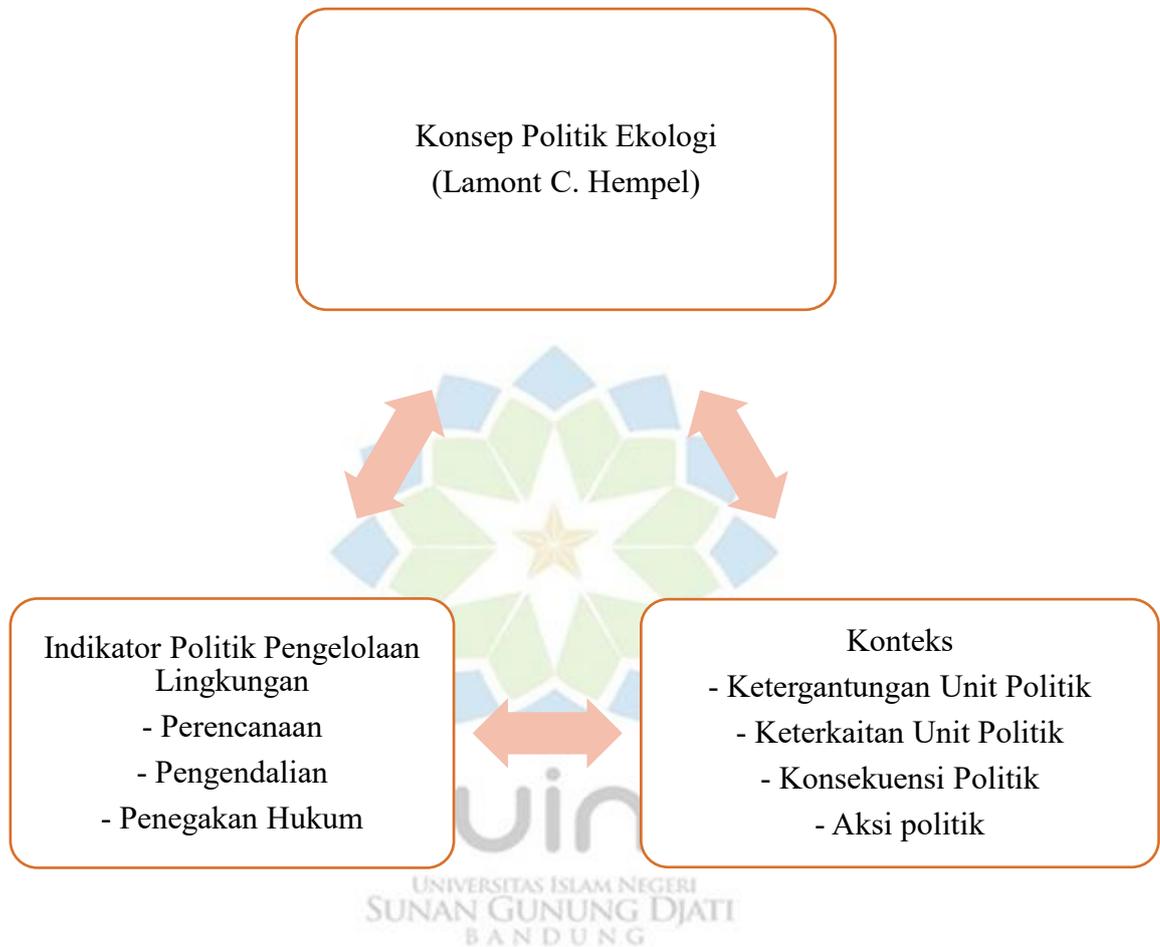
Dalam artian nalar dampak sosial lingkungan merupakan hasil dari fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, maka dampak sosial merupakan istilah mendasar untuk menganalisis suatu fenomena sosial (Nadiyah, 2018) . merupakan akibat dari fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, dampak lingkungan sosial merupakan istilah mendasar untuk menganalisis suatu fenomena sosial (Nadiyah, 2018) .

Dampak dari sosial lingkungan seperti, pencemaran suatu wilayah, intensitas dan durasiterkena dampak, daerah tercemar, jumlah komponen lingkungan lain yang terkena dampak, sifat kumulatif dari komponen lingkungan lain yang terkena dampak, sifat kumulatif dampak , dan pencemaran lingkungan akibat dampak merupakan faktor-faktor yang itu terkena dampak secara signifikan dengan adanya kegiatan perusakan lingkungan. Akibat dampak dari pencemaran adalah semua faktor yang secara nyata dapat terkena dampak keberadaannya kegiatan merugikan. mengikuti kegiatan atau bisnis berikut berpotensi memberikan dampak besar, antara lain;

- a. Kegiatan potensi yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan kemerostotan pemanfaatannya.
- b. Pencemaran lingkungan.
- c. Dampak populasi.

Pemerintah dapat ikut mengatur dalam hal pengelolaan lingkungan hidup demi kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan karena terkadang diasumsikan bahwa pertumbuhan adalah akar dari kerusakan lingkungan. Pada UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 36 Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap organisasi atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL - UPL (usaha pengelolaan lingkungan-upaya pemantauan lingkungan) juga harus memiliki izin lingkungan, dan dengan memperhatikan potensipengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan , seperti :

1. Perubahan iklim.
2. Kerusakan dan punahnya keanekaragaman hayati.
3. Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan atau kebakaran hutan dan lahan.
4. Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam.
5. Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat.
6. Peningkatan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

Kerangka berpikir penelitian ini didasarkan pada kajian teoretis, yang berfungsi sebagai landasan untuk mengembangkan kerangka pemikiran.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu yang menjadi landasan mendasar bagi penulis dalam penelitian dan untuk dikembangkan dalam kemudian waktu dan untuk meminimalisir kesamaan secara komprehensif. Berikut beberapa hasil karya ilmiah terdahulu dengan adanya kesamaan topik serupa.

1. Arief Budiono, Tesis mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Tahun 2008 dengan Judul “Kebijakan Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan Saradan dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Partisipasi Masyarakat Melalui Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat” ditelaah alasan Perum Perhutani KPH Saradan memilih kebijakan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (PHBM) dan menilai apakah kebijakan PHBM tersebut berhasil meningkatkan kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Isu sosial juga berkembang sebagai akibat dari krisis ekonomi, adanya kebijakan yang buruk di masa lalu, dan marginalisasi penduduk sekitar hutan. Tidak mungkin menghentikan penebangan liar dan kerusakan hutan yang disebabkan oleh krisis ekonomi dan kebijakan yang buruk. Kekerasan terkadang dilakukan sebagai akibat dari masalah sosial dan ekonomi lainnya. (Budianto, 2008) Kesamaan dari Penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan lingkungan. Perbedaannya disini membahas Pengelolaan Hutan Bersama Kemasyarakatan (PHBM). Sedangkan peneliti melakukan penelitian tentang politik ekologi pada pengelolaan lingkungan. Selain itu perbedaan penelitian ini lebih membahas tentang pengelolaan kehutanan. Sedangkan skripsi peneliti mengarah pada pengelolaan lingkungan di Gunung Manglayang.
2. Faizal Oktavian, Skripsi mahasiswa Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Tahun 2020 dengan Judul “Politik Ekologi pada Aras Lokal (Studi Kasus Rencana Pembangunan Pengelolaan Limbah B3 Bahan, Berbahaya dan Beracun di Desa Tlogoretno Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)” kasus

lingkungan tercemar limbah dan mempengaruhi kesehatan manusia, ketika lingkungan sudah terkontaminasi limbah akan mengalami kerusakan ekologi lingkungan, secara otomatis limbah akan mencemari sumber air, air tanah, serta tanaman di lingkungan sekitar, dari sudut pandang kepentingan perkonomian, industrialisasi memang penting juga untuk pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas (oktavian, 2020). Kesamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas politik ekologi. Perbedaannya disini lebih membahas tentang perspektif di masyarakat maupun respon dengan adanya rencana pembangunan pabrik pengelolaan limbah bahan, berbahaya dan beracun (B3) dan mengkaji Implementasi kebijakan regulasi perizinan rencana pembangunan pengelolaan limbah B3. Sedangkan peneliti lebih fokus masalah ekologi yang ada di Gunung Manglayang dan bagaimana peran pihak terkait dalam mengatasi permasalahan tersebut.

3. Ratna Sari, Skripsi mahasiswa Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Tahun 2020 dengan judul "Analisis Politik Ekologi dalam Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengangkutan Batubara Melalui Jalan Umum (Studi Atas Dampak Sosial Lingkungan Daerah Aliran Sungai Musi Kecamatan Muara Belida)". Kegiatan pengangkutan batu bara menggunakan jalan umum di darat sudah dilarang, dan kebijakan tersebut didukung oleh Pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Muara Enim yang selama ini terganggu dengan angkutan batu bara melalui jalan umum. Akan tetapi dengan adanya pencabutan peraturan mengubah pengangkutan menggunakan jalur sungai, sehingga perubahan ini berdampak kepada masyarakat daerah aliran sungai musu (Sari, 2020).Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang dampak pencemaran lingkungan dari kebijakan yang di ambil oleh pemerintah dan dampak kerusakan lingkungan yang berakibat kepada lingkungan dan masyarakat sekitar. Selanjutnya perbedaan dari penelitian ini adalah lebih membahas tentang peran aktor politik dalam pencabutan peraturan. Sedangkan peneliti melakukan penelitian tentang peran pemerintah dalam mengelola

lingkungan.

4. Ichwan Nuttaqwa Dwi Putra Noris, mahasiswa Program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Tahun 2022 dengan judul “ Ekologi Politik Alih Fungsi Lahan Menjadi Lahan Pertanian Bawang Merah di Kabupaten Enrekang”. Kebijakan perlindungan lahan pertanian menjadi isu strategis dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional. Keberadaannya menjadi sangat penting mengingat tingginya permintaan terhadap lahan pertanian, sehingga terjadi persaingan pemanfaatan antar sektor pertanian dan non pertanian. Pemanfaatan lahan pada sektor non pertanian seperti lahan perkebunan jangka panjang, lahan tidur pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan menjadi lahan pertanian. Kabupaten Enrekang yang notabnya menjadi Kabupaten dengan hasil produktivitas pangan yang cukup mengesankan, namun hal tersebut memiliki gambaran yang berbanding terbalik dengan luas lahan yang dimiliki. Disisi lain akibat dari pengalih fungsi lahan ke lahan pertanian bawang merah mengakibatkan terjadinya masalah pada lingkungan karena yang pada awalnya daerah yang memiliki lahan yang mampu menampung resapan air kini menjadi daerah yang mudah dilanda bencana longsor dan banjir karena minimnya tamanaan jangka panjang yang menjadi tempat penyerapan air hujan (Noris, 2022). Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas dampak kerusakan lingkungan yang terjadi. Perbedaan penelitian ini adalah lebih membahas tentang pengalihan fungsi lahan menjadi lahan pertanian.
5. Devy Dhian Cahyati, Mahasiswa program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Tahun 2011 dengan judul “Analisis Konflik Ekologi Politik di Era Desentralisasi Sumber Daya Alam. (Studi Kasus : Konflik Penambangan Pasir Besi di Urut Sewu Kabupaten Kebumen”. Konflik rentan terjadi dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti dalam eksploitasi bahan tambang. Konflik dalam pengelolaan sumber daya alam biasanya melibatkan masyarakat, pemerintah, ENGO (Environmental Non Government Organization/ LSM Lingkungan) serta

perusahaan yang akan melakukan penambangan. Setiap aktor yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam memiliki kepentingan berbeda-beda yang saling bersinggungan. Sering kali perusahaan melakukan penambangan untuk mendapatkan keuntungan, pemerintah daerah mendukung penambangan demi peningkatan perekonomian daerah sementara masyarakat dan ENGO menolak penambangan dengan alasan ekologis dan kesejahteraan ekonomi. Penerapan desentralisasi di Indonesia pada masa otonomi daerah telah mempengaruhi pengelolaan sumber daya alam di daerah. Daerah memiliki wewenang untuk mengelola sumber daya alam seperti dalam pemanfaatan, perizinan dan bagi hasil sumber daya alam, termasuk menyetujui dan membuat perjanjian dalam pengelolaan tambang. Namun seringkali pengelolaan tambang yang disetujui kepala daerah ditentang oleh masyarakat setempat. Berbagai alasan mendasari penolakan masyarakat seperti hilangnya mata pencaharian dan kerusakan lingkungan sebagai pengaruh eksploitasi sumber daya alam (Cahyati, 2011). Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatan serta kebijakan pengelolaan lingkungan. perbedaannya ada pada konflik ekologi dan kepentingan aktor-aktor dalam pengambilan kebijakan sumber daya alam. Sedangkan peneliti melakukan penelitian tentang peran pihak terkait dalam melakukan pengelolaan lingkungan di Gunung Manglayang.